

Analisis Wacana Kritis terhadap Representasi Bansos di Indonesia: Pendekatan Berbasis Korpus

Fitria Habibatul Imamah¹ | Nur Kharirin²

Fitria.habibatul.imamah-2023@fib.unair.ac.id

¹²Universitas Airlangga, Indonesia

Received 9 August 2025

Revised 08 September 2025

Accepted 10 December 2025

Abstract

Social assistance (*bansos*) constitutes one of the key instruments in Indonesia's poverty alleviation policies. However, beyond its role as a welfare intervention, *bansos* has also emerged as a complex social discourse encompassing issues of distribution, justice, political dynamics, and the abuse of power. This study aims to uncover the representation of *bansos* discourse in Indonesia by employing a corpus-based critical discourse analysis approach. The data utilized in this study is drawn from the LCC Indonesia 2023 corpus, comprising 573 million tokens across 43 texts, analyzed using the CQPweb software. A mixed-methods approach combining both quantitative and qualitative techniques through corpus linguistics and critical discourse analysis was applied. The findings indicate that *bansos* is generally represented in a positive light, as a form of assistance and a solution to welfare-related issues. Nevertheless, the discourse also carries negative connotations, particularly in relation to corruption, political manipulation, and inequities in distribution.

Keywords: social assistance, critical discourse analysis, corpus linguistics, Norman Fairclough

Abstrak

Bantuan sosial (*bansos*) merupakan salah satu instrument penting yang terdapat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, di balik peran *bansos* sebagai intervensi kesejahteraan, *bansos* juga menjadi wacana sosial yang kompleks yang mencakup aspek distribusi, keadilan, politik, dan pada penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap representasi dari wacana *bansos* di Indonesia dengan memanfaatkan pendekatan analisis wacana kritis berbasis linguistik korpus. Data yang digunakan adalah LCC Indonesia 2023, terdapat 573 juta token dalam 43 teks yang dianalisis menggunakan perangkat lunak CQPWeb dengan menggunakan metode campuran; kuantitatif dan kualitatif dengan teknik linguistik korpus dan analisis wacana kritis. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa wacana *bansos* secara umum direpresentasikan secara positif sebagai bentuk bantuan dan solusi dari kesejahteraan, namun juga mengandung adanya konotasi negatif terkait adanya praktik korupsi, politik, dan ketidakadilan dalam distribusi.

Kata kunci: bantuan sosial, analisis wacana kritis, linguistik korpus, Norman Fairclough



This article is open access distributed under the terms of the, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium provided the original work properly cited.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Indonesia (Ciptawaty et al., 2025). Bansos merupakan bentuk intervensi dalam mengentaskan masalah Masyarakat rentan sosial maupun rentan ekonomi. Oleh sebab itu, bansos berada didalam konsep kesejahteraan sosial dan prosesnya tidak dapat terlepas dari sebuah kebijakan. Dalam pandangan Lesmana (2010) sebuah kebijakan memiliki sifat memaksa, sehingga pihak yang dituju harus mematuhi dan menjalankannya. Kebijakan juga bersifat jawaban terhadap masalah yang ada, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Begitu juga Carl J. Friedrich dalam Agustino (2008) memberikan penjelasan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Alba, 2019).

Wacana bansos dikonstruksi dalam realitas sosial masyarakat yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa wacana merupakan instrumen krusial dalam membentuk persepsi publik, sekaligus menjadi cerminan dari pandangan dan sikap masyarakat dalam berbagai konteks sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan campuran yang menggabungkan Linguistik Korpus dan Analisis Wacana Kritis (AWK). Linguistik korpus merupakan studi bahasa berdasarkan contoh penggunaan Bahasa dalam nyata dalam kumpulan teks elektronik (McEnery & Wilson, 1996). Pendekatan ini mengandalkan teknik kuantitatif untuk memetakan pola asosiasi dan frekuensi, serta fungsi interpretasi kualitatif untuk menjelaskan faktor kontekstual (Baker, 2006; Biber et al., 1998).

Dalam perkembangannya, linguistik korpus telah diintegrasikan ke dalam AWK untuk membedah keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan struktur sosial (Hamad, 2007). AWK menurut Fairclough memandang wacana sebagai praktik sosial yang berperan dalam membentuk relasi kuasa dan ideologi. Terdapat tiga dimensi analisis yang digunakan: (1) dimensi teks yang mencakup pilihan leksikal dan gramatikal; (2) dimensi praktik wacana yang meliputi proses produksi dan konsumsi teks; serta (3) dimensi praktik sosial yang berkaitan dengan hegemoni dan struktur sosial luas (Pribadi & Riady, 2022). Melalui dialektika penjelasan sosial ini, pola bahasa yang digunakan dapat terungkap fungsinya sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan korpus LCC Indonesia 2023 sebagai basis data utama. Korpus ini terdiri dari 573.557.097 token yang mencakup 43 teks berita berbeda dalam rentang tahun 2008 hingga tahun 2022 pada perangkat lunak CQPweb. Secara metodologis, analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola leksikal pada kata "bansos", sementara analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan pola tersebut dalam perspektif AWK.

Tahap analisis kuantitatif dimulai dengan melakukan analisis kolokasi, digunakan untuk mengidentifikasi kata apa saja yang berdampingan dengan kata "bansos". Dalam analisis kolokasi frasa baku yang digunakan adalah "bantuan sosial". Untuk menghindari analisis bersifat trivial maka digunakan singkatan "bansos", agar system dapat mengidentifikasi kata yang muncul di sekitar frasa tersebut secara utuh daripada menganalisis kata "bantuan" dan "sosial" secara terpisah. Perhitungan statistik *Log-Likelihood* (LL) dipilih dengan rentang 3 kata ke kanan dan 3 kata ke kiri, serta frekuensi kemunculan minimal 10. Dunning (1993) ukuran log-likelihood dapat mengukur kolokasi berdasarkan signifikansi, semakin tinggi nilainya mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bukan karena kebetulan, tetapi memiliki hubungan makna paling kuat dengan kata kunci (Al Fajri, 2017). Penentuan ukuran minimum frekuensi didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Insani & Roselani (2023) yang memilih ambang batas frekuensi 10. Dari hasil tersebut, diambil kolokasi berupa 5 kata benda, 5 kata kerja, dan 5 kata sifat untuk mengidentifikasi pola leksikal dominan dalam wacana (Baker, 2006).

Tahap kedua analisis kualitatif dilakukan melalui analisis konkordansi untuk melihat konteks penggunaan kata "bansos" dengan mengambil 8 konkordansi dari setiap kolokat yang muncul. Jumlah ini dipilih dengan rasionalisasi dapat memberi keseimbangan antara memberikan detail yang cukup untuk memahami konteks dan menjaga tampilan tetap mudah dikelola dan dibaca, sementara terlalu banyak baris dapat membuat pengguna kewalahan dan mempersulit fokus pada informasi yang relevan (Seretan & Wehrli, 2010). Fokus analisis pada tahap ini adalah representasi aktor sosial, pola evaluasi, dan struktur agensi. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan seluruh temuan menggunakan kerangka tiga dimensi Fairclough untuk mengungkap bagaimana wacana bansos terkonstruksi secara tekstual maupun sosial di Indonesia.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan oleh Bungsu (2019) menganalisis konstruk wacana pada citra KPK di media Republika dan Tempo melalui analisis wacana

kritis Fairclough. Sementara itu, Budiawan & Mulyani (2022) melakukan penelitian yang menganalisis wacana pada pemberitaan kasus korupsi dana bansos COVID-19 pada kompas.com dengan analisis model Fairclough. Penelitian terbaru dilakukan oleh Lantowa & Idul (2023) menganalisis ideologi media berita digital serta konstruksinya melalui linguistik aksi-aksi sosial dalam pemberitaan kebijakan pemerintah selama pandemic.

Berdasarkan wacana yang telah dibangun oleh media, berita maupun web, maka peneliti ini berusaha memperluas lingkup kajian bansos dengan menggunakan LCC Indonesia 2023 sebagai data yang akan dianalisis dan menjadikan pembeda dari penelitian terdahulu untuk mengungkap bagaimana wacana bansos di representasikan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan campuran; kuantitatif dan kualitatif berbasis linguistik korpus sebagai metodologi untuk menganalisis wacana kritis. Hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi sebagai literatur akademis di bidang linguistik maupun ilmu sosial serta secara spesifik dapat dijadikan referensi bagi para pekerja sosial yaitu pilar-pilar kesejahteraan sosial dibawah naungan Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Kemensos) dalam memberikan edukasi seputar bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) khususnya, dan umumnya untuk masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Dalam pencarian kata “bansos” pada LCC Indonesia 2023 yang berisi 573.557.097 token 43 teks, ditemukan kemunculannya sebanyak 4.172 token pada 37 teks berbeda di perangkat lunak CQPWeb.

LCC Indonesian 2023: powered by CQPweb	
Metadata for LCC Indonesian 2023	
Corpus title	LCC Indonesian 2023
CQPweb's short handles for this corpus	lccindonesianv3 / LCCINDONESIANV3
Total number of texts in corpus	43
Total word tokens in all corpus texts	573,557,097
Word types in the corpus	3,471,245
Standardised type:token ratio (1,000-token basis)	0.5248 types per token
Non-standardised type:token ratio	0.0061 types per token
Text metadata and word-level annotation	
The database stores the following information for each text in the corpus:	source year
The primary classification of texts is based on:	year
Words in this corpus are annotated with:	Part-of-speech tag (CS_UI_POS_Tagset) Lemma (TreeTagger_Lemma)
The primary word-level annotation scheme is:	Part-of-speech tag
Further information about this corpus is available on the web at:	https://docs.google.com/document/d/16noOK50DskZIJzTluTl-AFiaEm8LuuVrj3pXstYzeG0/edit

Gambar 1. Table metadata korpus LCC Indonesia 2023 dan detailnya dapat diakses melalui tautan : <https://docs.google.com/document/d/16noOK50DskZIJzTluTl-AFiaEm8LuuVrj3pXstYzeG0/edit?tab=t.0>

Kolokasi Kata Benda dari Bansos

No.	Word	Word Observed	Log-likelihood
1	Dana	979	6.824,010
2	Bantuan	631	4.356,320
3	Hibah	272	2.849,578
4	Penerima	249	2.161,948
5	Penyaluran	231	2.068,837

Tabel 1. Kolokasi kata benda dari bansos

Tabel 1 diatas menunjukkan hasil 5 kolokasi kata benda yang mendampingi kata “bansos” dengan nilai statistik log-likelihood tertinggi. Kata benda tersebut yaitu *dana*, *bantuan*, *hibah*, *penerima*, dan *penyaluran*. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwa kata benda *dana* menduduki frekuensi tertinggi berkolokasi dengan “bansos”. Dibuktikan dengan kemunculannya sebanyak 979 kali. Urutan kedua kata benda yang berkolokasi dengan “bansos” adalah *bantuan*, dengan kemunculannya sebanyak 631 kali. Menunjukkan kaitan erat dalam menjelaskan bansos adalah sebuah bantuan. Kolokasi kata benda ketiga adalah *hibah* dengan frekuensi kemunculannya sebanyak 272 kali. Urutan keempat adalah *penerima*, muncul sebanyak 249 kali. Dan terakhir adalah kata *penyaluran*, frekuensi kemunculannya sebanyak 231 kali. Berdasarkan 5 kolokasi kata benda tersebut, kata “bansos” lebih banyak berkolokasi dengan kata benda bersifat positif, yaitu *bantuan*, *hibah*, dan *penyaluran*. Menunjukkan bahwa “bansos” merupakan sesuatu yang bernuansa positif. Sedangkan kata benda *dana* dan *penerima* lebih bersifat netral. Tetapi sifat-sifat tersebut bisa saja berubah tergantung pada konteks dan bagaimana kata-kata itu digunakan.

Konkordansi dari Kata Benda

Berdasarkan dari tabel 1, kata benda dengan frekuensi tertinggi (muncul 979 kali) yang berdampingan dengan kata “bansos” adalah kolokasi “dana”. Dari data temuan menunjukkan bahwa kolokasi “dana” berimplikasi pada sosial, ekonomi, dan politik. Kemunculan kata “dana” dalam pemberitaan terkait bansos tidak hanya berkonotasi netral yang merepresentasikan keuangan atau finansial bansos. Tetapi, pada data yang ditemukan kolokasi dana juga membingkai bansos sebagai sebuah problem pada teknis anggaran. Bagaimana penyelenggaraan distribusi bansos yang tidak setara, kemudian juga melihat adanya adanya implikasi sosial dan ekonomi pada baris 1, yang memperlihatkan bagaimana keterkaitan kondisi dari penyaluran bansos pada masalah peningkatan pengangguran. Baris 2, 4, 5, 6 dan 8, bahwa bansos berimplikasi dengan politik yang jauh dari harapan

sebenarnya. Baris 3 konteks efisiensi proses penyaluran bansos. Pembingkaiannya tersebut dapat berpotensi menggeser persepsi kesejahteraan yang dibangun melalui bantuan sosial menuju permasalahan terkait masalah distribusi dana, sehingga berhubungan dengan kekuasaan negara dan hak warga yang dinaturalisasi.

...global ini membuat pengangguran akan meningkat termasuk di Indonesia. Adapun dana	<u>bansos</u>	tersebut berasal dari dana desa, pemkab, provinsi, hingga pusat...
...menuturkan, sejauh ini pihaknya masih kerap menemukan kepala daerah menggunakan dana	<u>bansos</u>	untuk kepentingan pilkada. Alex menyadari saat ini kemampuannya untuk bersaing dengan...
...(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saya kira sudah lancar, dana	<u>bansos</u>	itu tahap pertama 98% mungkin sudah jalan. APBN (Anggaran...
...menganggap wajar KPK menggunakan pasal suap pada awal pengusutan kasus dana	<u>bansos</u>	Covid-19 ini. Bekasi 32 titik, kota Bekasi 53 titik dan...
...) sore.com- Dari kabar yang beredar, korupsi dana	<u>bansos</u>	eks Mensos Juliari P Batubara digunakan untuk mendanai calon kepala daerah.
... Pemprovsu kini juga tidak dapat menutupi kekurangan yang kita butuhkan. Dana	<u>bansos</u>	warga terdampak COVID-19 seharusnya mendapatkan dana Rp 250.000 per kepala keluarga dari Pemkot...
... menjadi Rp 99ribu untuk 2 jam. Dan khususnya dalam program dana	<u>bansos</u>	sehingga kami menjadi lebih tenang dan lebih yakin dalam menjalankan tugas.
...19 ribu keluarga yang belum mendapatkan bantuan karena masih menunggu pencairan dana	<u>bansos</u>	dari pemerintah provinsi Banten. Dari jumlah tersebut meliputi asisten ahli sebanyak...

Table 2. Konkordansi kata benda *dana*

Kolokasi kata benda kedua adalah *bantuan*, pada tabel tersebut dapat diamati bagaimana bansos dibingkai menjadi pemberitaan yang merepresentasikan adanya gap dari pemerintah dan hak warga negara. Pola dari data yang ditemukan dalam tabel mengindikasikan bahwa bansos lebih dominan berada pada ingatan masyarakat sebagai pemberian dari negara atau pemerintah bukan sebagai hak sosial bagi warga negara yang membutuhkan. Pembingkaiannya yang mengkonstruksikan sebagai pandangan tersebut akan berdampak pada relasi kekuasaan dari pihak negara dan warga negara. Maka ketika berita terkait bansos yang berkolokasi dengan kata bantuan, terdapat ketidaksetaraan dalam memposisikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, negara seolah diposisikan sebagai aktor utama yang “memberi”, sementara warga negara dinilai sebagai penerima pasif.

...sehingga merupakan potensi mengembangkan sekolah. Ada lima jenis bantuan sosial alias	<u>bansos</u>	di Klaten yang digelontarkan pemerintah selama Covid-19. Ada lima jenis...
...lebih. Adi juga menyoroti kinerja pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial (	<u>bansos</u>	) untuk Masyarakat terdampak Covid-19. Adi juga sangat menyayangkan sikap pemerintah...
...pemerintah desa bisa dengan mudah menyalurkan, baik itu BLT Desa,	<u>bansos</u>	tunai maupun bantuan paket sembako. Agar segala sesuatunya terasa lembut dan...
...dalam video berdurasi 30 detik. Aksi massa memanass, dipicu terkait	<u>bansos</u>	atau bantuan tunai langsung (BLT) yang diduga kepala Desa tidak...
...agar pemerintah daerah secara berkala memperbarui data Masyarakat penerima bantuan sosial (	<u>bansos</u>	) dan subsidi yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)...
...Aziz Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI menyoroti rencana penyaluran bantuan sosial (	<u>bansos</u>	) Program Keluarga Harapan (PKH), sembako Bantuan Sosial Tunai...
...Baik bangunan sarana Pendidikan, Kesehatan, amupun perkantoran. Baik	<u>bansos</u>	sembako bantuan Presiden maupun BST, disalurkan selama tiga bulan yakni April...
...) Citarum. Bandung (ANTARA) - Pendistribusian bantuan sosial (	<u>bansos</u>	) tahap III Provinsi Jawa Barat (Jabar) tuntas 100 persen...

Table 3. Konkordansi kata benda *bantuan*

Kolokasi kata benda ketiga yang dianalisis adalah *hibah*. Kata ini memiliki hubungan erat dan saling terkait dengan "bansos", yang terbukti dari penggunaan kata hubung "atau" dan "dan" dalam konkordansi tabel 4. Konteks penggunaan kata "hibah" bervariasi: pada Baris 1, 2, 3, dan 5, kata ini menunjukkan konteks yang berkonotasi positif di mana bansos dianggap sebagai solusi dari pemerintah. Namun, pada Baris 4 dan 7, *hibah* justru digunakan dalam konteks berkonotasi negatif yang merujuk pada adanya penyelewengan bansos. Selain itu, Baris 6 menyoroti penggunaan kata dalam konteks adanya pertentangan terkait teknis administrasi, yang menunjukkan aspek lain dari penggunaannya. Kemunculan kata bansos yang berkolokasi dengan kata *hibah* menunjukkan adanya dominansi konstruksi bansos sebagai objek pengelolaan anggaran negara, bukan sebagai hak kesejahteraan milik warga negara. Dari banyaknya konteks tersebut, kata bansos dibingkai melalui bahasa yang merujuk pada instruksi petinggi negara yang memposisikan negara dan pemerintah daerah sebagai aktor utama dari adanya bansos tersebut, sementara peran dari warga negara sebagai penerima terlihat hadir secara implisit. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, framing tersebut memiliki fungsi untuk strategi legitimasi yang menormalisasikan posisi negara sebagai pihak yang berkuasa. Namun, pada pola yang sama, munculnya bansos

dalam konteks korupsi dan penyelewengan dana tidak serta-merta menggoyahkan strategi tersebut, karena praktik dari korupsi sering direpresentasikan sebagai tindakan dari oknum, bukan sebagai persoalan struktural di dalam sistem distribusi bansos.

...5 triliun rupiah atau sekitar 31 persen dialokasikan untuk belanja hibah/	<u>bansos</u>	Dalam upaya mengatasi dampak pandemic Covid-19 di daerah. "Dari 56...
...akibat pandemi virus corona (covid-19). "Pemberian hibah atau	<u>bansos</u>	Sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan...
...juga dialokasikan untuk Desa Pakraman yang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial	<u>bansos</u>	, hibah dan bantuan keuangan kabupaten (BKK). Pengendara...
...Gatot Pujo Nugroho jadi tawanan KPK juga gara-gara penyimpangan dana hibah dan	<u>bansos</u>	. Beberapa tahun lalu, aksi pembaikotan serupa terhadap dua hotel Brunei...
...Kota Depok lebih mementingkan Masyarakat yang memang membutuhkan dana hibah ataupun dana	<u>bansos</u>	. Pemerintah Kota Depok pun mulai serius menanggapi fenomena yang sempat menggegerkan...
...Pemko Bogor saat ini, jelas Dody, masalah hibah dan	<u>bansos</u>	Secara teknis administrasi dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat dan masih dijadikan debat...
...tudingan Huawei sebagai mata-mata Tiongkok. Selain itu juga kasus korupsi penyaluran	<u>bansos</u>	Dan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga kata...
..."Ya semuanya yang paling benar itu mengencangkan ikat pinggang di hibah	<u>bansos</u>	. Ya semua orang ingin cepat ya pasti, ingin segera dihalalkan...

Tabel 4. Konkordansi kata benda *hibah*

Kolokasi kata benda keempat adalah *penyaluran*, yang menunjukkan hubungan erat dengan "bansos". Kata ini merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi target "bansos" atau yang menerima bantuan tersebut. Dari data KWIC menunjukkan bahwa penyaluran bansos muncul dalam berbagai konteks, antara lain terkait mekanisme distribusi melalui distribusi PT Pos atau unit loket pembayaran, waktu dan durasi penyaluran, serta persoalan tidak tepat sasaran dan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat. Dalam kerangka AWK, framing tersebut merepresentasikan adanya kegagalan bansos yang dipersempit menjadi kendala teknis bahkan kesalahan oleh penerima, sementara yang menjadi aktor utama dalam persoalan tersebut yakni tanggung jawab negara secara struktural tidak pernah dipermasalahkan.

...ini dibagi menjadi dua jenis yaitu kronis dan akut. Adapun penyaluran	<u>bansos</u>	Tunai itu akan dilakukan oleh PT Pos. Adapun waktu penyaluran BSU per...
...pada hari kerja mulai pukul 06.00-21.00. Adapun waktu penyaluran	<u>bansos</u>	Beras diberikan selama 3 bulan. Adapun waktu tempuh dari kota Waingapu...
...ada pelaku Dangdut alias dangdut itu masih dianggap murah! Akui Penyaluran	<u>Bansos</u>	Ada yang Tak Tepat Sasaran. Anis: Tidak... Akui punya...
...ini masih memungkinkan penyebaran virus corona dan covid-19. Alhasil, penyaluran	<u>bansos</u>	Kerap tidak tepat sasaran. Alhasil penyanyi asal Surabaya ini terlihat tampil...
...Juliari Batubara mengungkapkan sejumlah kendala yang umum dijumpai di lapangan dalam penyaluran	<u>bansos</u>	Tunai. ANTARA- Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebut keberadaan e-warong...
...banyaknya penyalahgunaan kewenangan pejabat, seperti di Kabupaten Jember dalam proses penyaluran	<u>bansos</u>	Dengan ditumpangi kampanye, semakin memperlebar gap potensi kemenangan antara pejabat dan...
Berbagai upaya telah dilakukan agar Kami bisa menjadi KPM program penyaluran	<u>bansos</u>	Pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan mendukung pelaku...
...seorang penerima manfaat. Camat Ranah Pesisir Zul Arzil menyebutkan, penyaluran	<u>bansos</u>	Tunai di Ranah Pesisir dilakukan dengan membuka beberapa unit loket pembayaran.

Tabel 5. Konkordansi kata benda *penyaluran*

Kolokasi Kata Kerja dari Bansos

NO.	Word	Word Observed	Log-likelihood
1	Disalurkan	70	529,447
2	Menyalurkan	36	213,424
3	Diberikan	66	182,814
4	Menerima	67	171,273
5	Berupa	50	132,205

Tabel 6. Kolokasi kata kerja dari bansos

Tabel diatas menunjukkan hasil analisis statistik *log-likelihood*, ditemukan lima kolokasi kata kerja dengan frekuensi tertinggi yang mendampingi kata "bansos", yaitu *disalurkan*, *menyalurkan*, *diberikan*, *menerima*, dan *berupa*. Kata kerja dengan frekuensi kemunculan terbanyak adalah *disalurkan* sebanyak 70 kali. Di ikuti kata *menyalurkan* dengan frekuensi kemunculan sebanyak 36 kali. Urutan ketiga, kata *diberikan* dengan frekuensi mendampingi sebanyak 66 kali. Berikutnya adalah kata *menerima* dengan

frekuensi kemunculan sebanyak 67 kali. Dan urutan terakhir adalah kata *berupa* dengan frekuensi kemunculannya sebanyak 50 kali. Secara umum, kolokasi ini mengindikasikan bahwa "bansos" memiliki konotasi positif karena merujuk pada proses pemberian dan penerimaan bantuan. Meskipun demikian, hasil dari analisis kolokasi saja belum cukup untuk merepresentasikan makna kata "bansos" secara utuh, sehingga diperlukan analisis konkordansi yang lebih mendalam untuk melihat konteks penggunaannya secara lengkap.

Konkordansi dari Kata Kerja

Berdasarkan Tabel 6, dua kolokasi kata kerja yang paling sering mendampingi kata "bansos" adalah *disalurkan* dan *menyalurkan*. Kedua kata kerja ini memiliki makna yang berkaitan dengan tindakan menyampaikan atau mendistribusikan bantuan. Pemberitaan lebih dominan pada konstruksi aktif seperti pihak pemerintah dan kemensos menyalurkan bansos dan permintaan Presiden untuk menyalurkan bansos menunjukkan bahwa wacana tentang bansos secara tidak langsung konsisten dalam mengunggulkan kinerja negara dan elit politik. Konteks dari tabel tersebut merujuk pada situasi pandemi, di mana tindakan menyalurkan dibingkai sebagai respon yang aktif dan cepat oleh negara terhadap situasi krisis tersebut, sehingga citra yang tampak dari pemberitaannya adalah negara dan pemerintah sebagai aktor utama yang responsive dalam penanganan penyaluran bansos. Melalui analisis wacana kritis, pola tersebut dalam berfungsi sebagai strategi legitimasi secara personal yang seakan melekat pada suatu instansi tertentu, sementara bagaimana warga negara sebagai penerima memiliki representasi yang pasif dari kebijakan.

..."imbuhnya. Dua minggu lagi, Kementerian sosial akan menyalurkan	<u>bansos</u>	Khusus dengan durasi selama 3 bulan untuk daerah Jabodetabek. Dua minggu...
...Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan Amanah khususnya dalam menyalurkan	<u>bansos</u>	Di Tengah pandemi covid-19 yang kita hadapi. Hartono mengambil 120 kg...
...hingga Desember 2020. Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan	<u>bansos</u>	Kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Juliari menjelaskan saat...
...masyarakat di Indonesia pasti akan menghadapi berbagai kendala. Pemerintah menyalurkan paket	<u>bansos</u>	Masing-masing sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama tiga bulan sebagai upaya...
...(Jokowi) pun meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menyalurkan	<u>bansos</u>	Pada awal Januari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun...
...juga meminta agar PT Pos Indonesia membuka loket lebih banyak untuk menyalurkan	<u>bansos</u>	. Selain itu, Juliyatmono juga mengatakan tracing akan dilakukan untuk mengetahui...

...Stasiun Surabaya Gubeng juga terlambat hingga 82 menit. Selanjutnya menyalurkan berbagai	<u>bansos</u>	Untuk Masyarakat terdampak pandemi,” tutur Mensos Ari. Selanjutnya menyanyi...
...KPK juga berniat melacak kelayakan dari Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk menyalurkan	<u>bansos</u>	Tersebut. Tak hanya menembak mati, ternyata juga memutilasi jasad korbannya...

Tabel 7. Konkordansi kata kerja *menyalurkan*

Kata kerja berikutnya adalah *diberikan*. Berdasarkan analisis konkordansi pada Tabel 8, konteks yang dapat diketahui adalah adanya peran pemerintah dalam penyaluran bansos yang terlihat tepat sasaran. Data tabel tersebut merepresentasikan bansos melalui aspek waktu, jenisnya, dan mekanisme distribusi yang membingkai sebagai objek admistratif. Dalam perspektif analisis wacana kritis, framing seperti itu terkesan menormalisasi adanya relasi kekuasaan yang asimetris antara pemerintah yang dianggap sebagai actor utama pada aspek kesejahteraan warga negara melalui penyaluran bansos yang tepat, sedangkan penerima bansos dinilai hanya hadir sebagai aktor pasifnya.

...pada hari kerja mulai pukul 06.000-10.000. Adapun waktu penyaluran	<u>bansos</u>	Beras diberikan selama 3 bulan. Adapun waktu tempuh dari kota Waingapu...
...serta bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 33 keluarga. “	<u>bansos</u>	Diberikan berasal dari Alumni SMAN 1 Padang Angkatan 76 dengan jumlah bantuan...
...Purworejo Agus Bastian SE MM kepada 16 perwakilan dari seluruh kecamatan.	<u>Bansos</u>	Sembako ini diberikan masih dengan, “Bansos sembako Jabodetabek dan bansos...
...Bansos tersebut akan mulai disalurkan pada pekan pertama Januari 2021.	<u>Bansos</u>	Tersebut diberikan pada warga kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, dengan tetap...
...Jabodetabek. Bansos untuk rakyat yang menderita merupakan tanggung jawab pemerintah.	<u>Bansos</u>	Yang akan diberikan ke depan ini harus tepat sasaran, distribusi di...
...di lapangan harus tetap menjaga protocol Kesehatan, “kata Puan.	<u>Bansos</u>	Yang diberikan salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).”
...di wilayah Kecamatan Sukakarya. Bupati Musirawas H Hendra Gunawan mengatakan,	<u>bansos</u>	Diberikan bukan hanya kepada Masyarakat pra Sejahtera, tapi juga elemen Masyarakat...
...mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program Bantuan Sosial (	<u>bansos</u>	) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.

Tabel 8. Konkordansi kata kerja *diberikan*

Kata kerja keempat adalah *menerima*. Berdasarkan analisis konkordansi pada Tabel 9, kata kerja *menerima* menunjukkan penggunaan yang kompleks dengan beragam konteks sebagai respons pemerintah, atau sebagai relasi antara masyarakat dengan perekonomian,

bahkan konteksnya juga terkait pelaksanaan. Mengetahui frasa menerima bansos dari data ini, tentu merepresentasikan penerimaan bantuan dan mengkontruksi warga negara sebagai objek evaluasi moral karena dianggap pasif perannya. Hak kesejahteraan tersebut dipersempit menjadi persoalan kebijakan administratif. Analisis wacana kritis menilai pola tersebut melalui munculnya dikotom *layak* dan *tidak layak* dalam menerima bantuan yang memvalidasi adanya kesalahan sasaran. Oleh karena itu, peran warga negara tidak hanya sebagai penerima pasif dan sistem administrative, tetapi juga sebagai sarana stabilisasi ekonomi di dalam narasi kebijakan.

...akan ada lebih banyak Kepala Keluarga (KK) yang menerima	<u>bansos</u>	. Anies menyampaikan, pandemi besar terakhir yang dihadapi umat manusia Adalah...
...disapa menyampaikan bahwa total 600 penerima bantuan ini akan menerima masing-masing paket	<u>bansos</u>	Sembako senilai 300 ribu rupiah. Dalam sambutannya, Yuni berharap warga...
...2020, sebanyak 134 keluhan di antaranya mengenai Masyarakat yang tidak menerima	<u>bansos</u>	, meski terdaftar. Dari total 309 kasus terkonfirmasi positif di Solo...
...masyarakat yang akan terkena imbasnya. Dengan demikian, Masyarakat yang menerima	<u>bansos</u>	Bisa ikut juga berperan dalam meningkatkan konsumsi dalam negeri di masa COVID-19...
...mengingat status pekerjaannya, Nuh mungkin termasuk rakyat yang malah harus menerima	<u>bansos</u>	. Dia malas beli drone karena takutnya enggak saya, “ucap...
...rumah. Dia menyebut bantuan difokuskan kepada penyandang disabilitas yang belum menerima	<u>bansos</u>	Dari pemerintah. Dia menyabut, bantuan Mulyadi sangat bermanfaat bagi Masyarakat...
...rongga perut. Dikutip dari website Kemensos, syarat agar bisa menerima	<u>bansos</u>	Beras ini yakni harus terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...
...seperti orang-orang yang mampu rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa untuk menerima	<u>bansos</u>	. “Jadi kita tekankan sekali lagi, tes swab ini aman...

Tabel 9. Konkordansi kata kerja *menerima*

Kata kerja terakhir yang mendampingi kata “bansos” adalah *berupa*. Secara leksikal dalam KBBI Daring bermakna nyata, terlihat, berwujud, elok rupa, cantik. Representasi yang ditunjukkan dalam data adalah pergeseran bantuan sosial sebagai instrument kesejahteraan menjadi objek komoditas ekonomi. Dilihat dari penekanan bentuk material yang diberikan hal ini memperlihatkan seolah bansos merupakan sesuatu bernilai tinggi dalam sistem pengadaan ekonomi negara. Melalui perspektif analisis wacana kritis dapat dinilai wacana dugaan kegiatan penyelewengan dalam kegiatan bansos cenderung

mengindividualisasi tanggung jawab, sehingga logika pengadaan bansos sebagai sistem tidak sepenuhnya dipermasalahkan.

...diharapkan dapat memenuhi Sebagian kebutuhan pokok Masyarakat terdampak wabah Covid-19. “	<u>Bansos</u>	Berupa sembako dengan nilai bantuan Rp600 ribu per bulan dan per KK...
...), kartu sembako, maupun bantuan langsung tunai maupun lainnya.	<u>Bansos</u>	yang diserahkan berupa bantuan keserasian sosial Rp 300 juta kepada dua ketua...
...yang merupakan dokter puskesmas itu. Dugaan suap ini diawali adanya pengadaan	<u>Bansos</u>	Penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan...
...sekitar Rp 5,9 triliun. Dugaan suap itu diawali adanya pengadaan	<u>Bansos</u>	Penanganan berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai...
...dan dilaksanakan dengan 2 periode. Dugaan suap itu diawali adanya pengadaan	<u>Bansos</u>	Penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan...
...bantuan dari Kementerian melalui dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa	<u>Bansos</u>	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Desa Sungai Bakau Besar...
...adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI, kami akan memberikan	<u>bansos</u>	Khusus berupa sembako dengan durasi selama 3 bulan yang akan kami mulai...
...jika dijumlah, total keuntungan yang diduga didapat Juliari Batubara dari pengadaan	<u>bansos</u>	Berupa sembako sebesar Rp 17 miliar. “Jika dikaitkan dengan Covid-19,...

Tabel 10.Konkordansi kata kerja *berupa*

Kolokasi Kata Sifat dari Bansos

No.	Word	Word Observed	Log-likelihood
1	Tunai	92	775,750
2	Cair	26	257,792
3	Nontunai	13	143,780
4	Sebesar	62	95,296
5	Fiktif	11	105,408

Tabel 11. Kolokasi kata sifat dari bansos

Tabel 11 menunjukkan hasil bahwa wacana bansos di Indonesia sangat didominasi oleh aspek mekanisme pemberian, yang direpresentasikan melalui kata sifat *Tunai* sebagai kolokasi paling signifikan dengan nilai *Log-likelihood* mencapai 775,750 dan frekuensi kemunculan sebanyak 92 kali. Dominasi ini, diikuti oleh kata *Cair* (LL: 257,792) dan *Nontunai* (LL: 143,780),

mengindikasikan bahwa perhatian utama dalam teks korpus tertuju pada prosedur administrasi dan realisasi ketersediaan dana bantuan bagi masyarakat. Selain itu, kemunculan kata *Sebesar* (LL: 95,296) memperlihatkan bahwa narasi mengenai bansos sering kali berkaitan erat dengan penyebutan nominal anggaran atau besaran bantuan yang diberikan. Namun, di balik narasi prosedural tersebut, terdapat temuan kritis dengan munculnya kata sifat *Fiktif* (LL: 105,408) dalam daftar kolokasi utama.

Berdasarkan tabel kolokasi kata sifat diatas, wacana bansos dalam korpus LCC Indonesia tidak bersifat Tunggal (posisitif); terdapat dimensi masalah integritas yang cukup kuat, seperti kemunculan kata sifat *fiktif* yang mengarah ke isu data palsu atau penyimpangan distribusi, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari persepsi publik terkait bantuan sosial di Indonesia. Namun perlu analisis konteks untuk mengetahui representasi “bansos” secara luas, maka analisis konkordansi diperlukan dari masing-masing kata sifat tersebut.

Konkordansi Kata Sifat dari Bansos

Berdasarkan tabel 11 kolokasi kata sifat dari “bansos” dengan frekuensi tertinggi adalah kata *tunai* (table 12). Konteks yang dapat diketahui adalah adanya wacana penyaluran bantuan sosial sebagai mekanisme distribusi teknis dan administrasi negara, terutama dalam bentuk bantuan tunai dan non-tunai. Data menunjukkan bawa bansos tersebut merepresentasikan objek penyaluran melalui mekanisme tersebut melibatkan beberapa pihak institusi negara. Berdasarkan pandangan analisis wacana kritis, framing pemberitaan tersebut memposisikan kesejahteraan warga negara sebagai urusan administratif.

...Anji soal sekolah daring tersebut. “Ada juga yang ingin urusan	<u>bansos</u>	Baik BLT tunai maupun non tunai diselesaikan dulu sehingga BLT DDnya tertahan...
...ini dibagi menjadi dua jenis yaitu kronis dan akut. Adapun penyaluran	<u>bansos</u>	Tunai itu akan dilakukan oleh PT Pos. Adapun penyaluran BSU per...
...pemerintah desa bisa dengan mudah menyalurkan, baik itu BLT Desa,	<u>bansos</u>	Tunai maupun bantuab paket sembako. Agar segala sesuatunya terasa lembut dan...
...dalam video berdurasi 30 detik. Aksi massa memanass, dipicu terkait	<u>bansos</u>	Atau bantuan tunai langsung (BLT) yang diduga kepala Desa tidak...
...saat ini masih menginjakkan usia 21 tahun. Alexander berharap dengan berubahnya	<u>bansos</u>	Sembako menjadi tunai tidak ada pengurangan dari sisi kualitas maupun target penerima...

...Juliari Batubara mengungkapkan sejumlah kendala yang umum dijumpai di lapangan dalam penyaluran	<u>bansos</u>	Tunai. ANTARA- Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebut keberadaan e-warong...
...Bansos sembako ini diberikan masih dengan "Bansos sembako Jabodetabek dan	<u>bansos</u>	Tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi Sembilan bulan hingga Desember, "jelas dia...
...jelas dia. Bansos sembako Presiden untuk DKI Jakarta, Bodetabek dan	<u>bansos</u>	Tunai diluar Jabodetabek. Bansos tersebut diserahkan kepada para guru...

Tabel 12. Konkordansi kata sifat *tunai*

Kata sifat berikutnya yang mendampingi kata "bansos" adalah *cair*. Melalui kata sifat *cair* tersebut menandakan pencairan yang dilakukan sebagai makna kesejahteraan. Konteks dari data tersebut adalah wacana pencairan bansos dinyatakan sebagai momen krusial antara pihak penyalur dan penerima, baik sebagai janji kebijakan maupun sebagai titik rawan penyimpangan. Perspektif dari analisis wacana kritis terhadap data tabel tersebut adalah adanya pergeseran hak kesejahteraan sosial kepada keberhasilan negara dalam tindakan administratif. Lebih jauh lagi, kehadiran kosakata bernuansa hukum seperti *suap*, *tersangka Jafar*, dan *korporat* dalam baris yang sama dengan kata "bansos" mengindikasikan adanya praktik diskursif yang menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan skandal korupsi. Secara sosial-budaya, tabel ini merekam jejak sejarah di mana bansos bukan lagi sekadar alat perlindungan sosial, melainkan instrumen politik dan ekonomi yang rentan disalahgunakan, memicu keluhan massal masyarakat (seperti di Klaten dan Boyolali) akibat ketidakpastian distribusi dan ganti rugi aset yang tidak transparan.

...Indonesi ini lebih baik lagi. Dalam pidatonya, Risma menargetkan seluruh	<u>bansos</u>	Akan cair 100 persen pada akhir 2020. Dalam pidatonya Selasa malam...
...SK) pengangkatan. Ia mengatakan aba-aba akan segera dikeluarkan supaya uang	<u>bansos</u>	Tersebut bisa cair awal Juni nanti. Ia mengatakan Aceh Timur telah...
...anak-anak mereka Adalah kira-kira dua tahun atau kurang sedikit. Tetapi setelah	<u>bansos</u>	Cair, diminta lagi antara Rp 60 juta sampai 70 juta...
...suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL). 303051 setelah dana	<u>bansos</u>	Cair, maka acara peresmian Pasar Raya Pedan bisa segera dilaksanakan.
...mengeluarkan Perpu pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tol. 447123 setelah	<u>bansos</u>	Cair, warga ingin mendapat kejelasan Ganti rugi aset. 447124 selain...
...di rumah Oki, masih dialirkan ke drainase depan rumah. Setelah	<u>bansos</u>	Cair, warga ingin mendapat kejelasan Ganti rugi aset. Setelah menerima...

...ini. Tersangka Jafar belum ditahan karena dianggap kooperatif. Tetapi setelah	<u>bansos</u>	Cair, diminta lagi antara Rp 60 juta sampai Rp 70 juta...
...Klaten, dan Boyolali. "Masyarakat banyak mengeluh dan mananyakan dana	<u>bansos</u>	Yang belum cair pada masa reses. Masyarakat mengeluh dan melaporkan permasalahan...

Tabel 13. Konkordansi kata sifat *cair*

Kolokasi kata sifat ke-tiga Adalah kata *nontunai* merupakan antonym dari kata sifat *tunai*. Konkordansinya dapat dilihat pada tabel 14. Konteks wacana terhadap kata *nontunai* secara konsisten disandingkan dengan aktor negara seperti Presiden Jokowi dan Menteri Sosial, yang membangun citra bahwa kebijakan ini adalah narasi "top-down" yang mendesak dan modern melalui penggunaan modalitas seperti "segera" dan "fokus". Dalam dimensi praktik diskursif, teks-teks tersebut memperlihatkan adanya intertekstualitas antara kebijakan bantuan sosial dengan agenda besar inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi tahun 2016-2017, di mana media massa digunakan sebagai kanal untuk melegitimasi efisiensi sistem digital di mata publik.

Sementara pada praktik sosial, wacana ini merefleksikan upaya negara untuk memperluas kontrol sosial terhadap masyarakat kelas bawah. Dengan mengubah bantuan tunai yang sulit dilacak menjadi sistem *nontunai* melalui *e-warong*, negara tidak hanya mendisiplinkan perilaku konsumsi penerima manfaat agar masuk ke dalam sistem perbankan, tetapi juga melakukan komodifikasi kemiskinan dengan melibatkan sektor usaha dalam penyaluran bantuan. Secara politis, narasi bahwa negara berada dalam kondisi "sangat aman" di tengah penyaluran bantuan ini berfungsi sebagai alat stabilitas nasional, di mana bantuan sosial digunakan untuk meredam potensi gejolak sosial sekaligus memperkuat legitimasi birokrasi melalui modernisasi digital yang sangat terkontrol.

...menunjuk Bantuan Nasi Bungkus yang menjadi salah satu pintu bantuan di luar	<u>bansos</u>	Tunai dan nontunai Pemprov Jabar. Dia menunjukkan atribut pemain Manchester United...
...Prabowo didukung mafia. Ia menyebut, program PKH ini merupakan perluasan	<u>bansos</u>	Secara nontunai. Ia menyebut proyek sedang mereka kembangkan, Signature Park...
...jika melihat di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap anak. Mensos: maksimalisasi	<u>bansos</u>	Nontunai focus 201729 November 2016 22:31 Menteri Sosial Khofifah Indar...
...Parawansa mengatakan Kementerian yang dipimpinnya akan focus pada maksimalisasi bantuan sosial (	<u>bansos</u>	) nontunai pada 2017. Mensos menambahkan penyediaan lahan topangan hidup itu...

...this category: << Menko PMK: Gencarkan Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran	<u>bansos</u>	PKH nontunai Presiden Jokowi: Negara dalam keadaan aman, sangat aman...
...menutup kemungkinan menginisiasi para pelaku usaha di luar e-warong untuk berkontribusi menyalurkan	<u>bansos</u>	Nontunai. Pemerintah juga wajib memastikan jaminan pemulangan bagi kelompok Rohingya yang...
...Keuangan Syariah (KNKS) segera diteken bulan depan. Perpres mengenai	<u>bansos</u>	Nontunai direncanakan segera selesai sebelum akhir November, dimana pembahasannya tinggal...
...diatasi. Sebagai langkah awal, pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran	<u>bansos</u>	Nontunai di 44 kota pada Januari 2017. "Sebagai langkah awal...

Tabel 14. Konkordansi kata sifat *nontunai*

Kolokasi kata sifat urutan ke-empat Adalah kata *sebesar*. Penggunaan kata *sebesar* yang diikuti nominal fantastis seperti "Rp 17 miliar" atau "Rp 85,56 triliun" berfungsi untuk mengonstruksikan citra besarnya tanggung jawab sekaligus kekuasaan yang dipegang oleh aktor-aktor politik seperti Juliari Batubara, Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sutan Riska. Namun, di sisi lain, teks ini juga secara kritis merekam adanya praktik diskursif kriminalitas, yang terlihat dari penyandingan dana bansos dengan diksi negatif seperti "diduga didapat", "menggelapkan", dan "belum dipertanggungjawabkan".

Sementara secara sosial-budaya, narasi dalam tabel ini mencerminkan realitas krisis di Indonesia (khususnya era Covid-19), di mana bansos bertransformasi menjadi arena kontestasi antara pemenuhan hak publik dan peluang korupsi elite. Kontras antara angka makro triliunan rupiah dengan angka mikro "Rp 100 ribu" atau "Rp 600 ribu" bagi penerima sasaran mengungkap adanya ketimpangan relasi kuasa, di mana negara diposisikan sebagai pihak yang mengontrol penuh nasib masyarakat melalui angka-angka tersebut.

...Jika dijumlah, total keuntungan yang diduga didapat Juliari Batubara dari pengadaan	<u>bansos</u>	berupa sembako sebesar Rp 17 miliar. "jika dikaitkan dengan Covid-19,...
...anggaran Sebagian besar atau 92% digunakan untuk belanja bantuan sosial	<u>bansos</u>	Sebesar Rp 85,56 triliun. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan...
...agar kebijakan ini dapat lebih optimal. "Pemerintah juga akan menambah	<u>bansos</u>	Tunai sebesar Rp 500.000 per penerima kartu sembako, "ujarnya."
...Masyarakat di Indonesia pasti akan menghadapi berbagai kendala. Pemerintah menyalurkan paket	<u>bansos</u>	Masing-masing sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama tiga bulan sebagai upaya...
...rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendistribusikan	<u>bansos</u>	Sebesar Rp 100 ribu dalam bentuk tunai kepada 1.903.383 keluarga rumah tangga sasaran...

...katanya. Utara Kombes Vudhi Herdi Susianti mengatakan, setidaknya MI menggelapkan	<u>bansos</u>	Sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta penggelontoran dana...
...harapa (PKH) lebih besar disbanding tahun sebelumnya. "Besaran	<u>bansos</u>	Kematian sebesar Rp 15 juta per jiwa, "ujar Khofifah Indar Parawansa...
Untuk pertama kalinya, Bupati Sutan Riska mengalirkan dana APBD 2019 untuk	<u>bansos</u>	Lansia sebesar Rp 3 miliar. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun...

Table 15. konkordansi kata sifat *sebesar*

Urutan terakhir kolokasi kata sifat yang mendampingi kata "bansos" adalah *fiktif*. Berdasarkan tabel 16 konkordansinya, "bansos" yang berdampingan dengan kata sifat *fiktif* memiliki konteks modus penyimpangan dan praktik korupsi. Data tabel menunjukkan bahwa bansos direpresentasikan sebagai objek penyimpangan dan korupsi yang melekat pada ranah politik. Berdasarkan perspektif analisis wacana kritis dapat diketahui bahwa pembingkai data tersebut dapat berfungsi mendelegitimasi aktor tertentu pada pengelolaan kesejahteraan sosial.

...akan bertambah, seiring dengan banyaknya kegiatan yang terprogramkan dari hibah dan	<u>bansos</u>	Banyak yang fiktif. Di proyek ini, Pemprov Banten menggulirkan dana...
...lembaga penerima hibah tahun 2011, ditemukan Lembaga dan forum fiktif penerima	<u>bansos</u>	Dan hibah. BPK mengungkapkan pengelolaan dana bantuan Bansos Provinsi Banten di nilai...
...politik, bukan sumbangan untuk individu. 488456 Hasil konfirmasi diduga penerima	<u>bansos</u>	Adalah organisasi fiktif. 488457 Es dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin...
Makanya penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggara diminta mengusut tuntas kasus	<u>Bansos</u>	Fiktif yang merugikan negara ini. Bila di hotel di pusat kota...
Diketahui, Kejari Sangatta melakukan pemeriksaan terhadap 40 kades untuk menelusuri dana	<u>bansos</u>	Yang diduga fiktif dengan pola penyaluran aspirasi anggota dewan. Hanya dana...
...tersangka baru. Berita sebelumnya, dalam kasus ini diduga adanya pencairan	<u>bansos</u>	Fiktif diketahui setelah salah satu organisasi penerima dana bansos saat diperiksa ternyata...
...yang ditarik perangkat desa setiap tahun. Dugaan pelanggaran hukum termasuk apakah	<u>bansos</u>	Itu diduga fiktif akan terus di dalam. Pihaknya pun nanti akan...
...politik. Syamsudin adalah salah seorang yang Namanya disebut sebagai penerima dana	<u>Bansos</u>	Fiktif, dimana pada 21 Januari 2009 tercatat telah menerima uang bantuan...

Tabel 16. Konkordansi kata sifat *fiktif*

Berdasarkan analisis kolokasi dan konkordansi yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa bahasa menjadi komponen yang memiliki berjuta ruang untuk dikuak

dan dianalisis secara mendalam. Lebih spesifik wacana bansos pada korpus LCC Indonesia 2023 yang menjadi objek dalam penelitian ini, sangat berperan dalam mengkonstruksi sebuah struktur sosial, mempengaruhi dan terlibat dalam dinamika masyarakat. Pola tersebut memiliki peran dalam kontruksi bansos sebagai instrument dari kesejahteraan sosial serta relasi kekuasaan.

Bansos sebagai Instrumen Distribusi dan Keadilan Sosial

Kolokasi yang didapatkan seperti penyaluran, disalurkan, menyalurkan, dan cair menunjukkan bahwa bansos direpresentasikan sebagai distribusi. Konkordansinya menunjukkan bahwa focus wacana terhadap mekanisme teknis. Namun, dalam praktik sosial, pola tersebut menjelaskan bahwa bansos yang merupakan intervensi pemerintah dalam menangani dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara praktik terjadi tidak selaras, yaitu munculnya pernyataan “tepat sasaran” dan “tidak tepat sasaran”. *Kedua, update* data penerima dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sinkronisasi data penduduk tidak terlaksana di beberapa level pemerintahan. Dari dua hal ini pertanyaan adil dan tidak adil muncul di masyarakat dan menyebabkan masalah sosial baru, yaitu kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak terdata sebagai penerima, sedangkan kondisi keluarga prasejahtera kepada mereka penerima dengan kondisi sejahtera

Bansos sebagai Simbol Kesejahteraan Masyarakat

Kolokasi yang muncul berdampingan dengan kata bansos yang mengarah pada framing bansos sebagai instrument keberhasilan dari suatu kebijakan, yang mana beberapa konteks terkait pencairan dana bansos direpresentasikan sebagai ukuran pemerintah terhadap suatu pencapaian. Program bansos yang telah dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup menuju keluarga mandiri dan sejahtera telah terlaksana dengan baik, menjadi salah satu penyumbang dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Bansos sebagai Kerangka Pemberdayaan dan Kemajuan Sistem

Munculnya kolokasi nontunai, e-warong, dan perpres menunjukkan bahwa wacana dari reformasi dan kemajuan sistem terlihat dalam praktik penyaluran bansos yang direpresentasikan sebagai program yang harus terus diupgrade dalam hal administrasi dan

digitalisasi. Konteks Analisis Wacana Kritis melihat pola tersebut, wacana mencerminkan ideologi kesejahteraan yang ditentukan dari pengalaman sosial penerima.

Lebih dalam lagi bansos tidak hanya menunjang kesejahteraan sosial, tetapi juga menciptakan dinamika kompleks yang erat kaitannya dengan sebuah kekuasaan dan politik dalam suatu masyarakat.

Kasus pelanggaran hukum, seperti penyelewangan, suap, korupsi bansos yang dilakukan oleh para pemimpin di level pemerintahan pusat maupun daerah menunjukkan etik integritas dalam bekerja memudar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Para petinggi pusat maupun daerah, masyarakat sebagai penerima maupun swasta sebagai mitra yang melakukan suap menunjukkan adanya praktik politik patronase dan nepotisme. Bansos yang ditunggangi politik sangat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan harusnya dapat merasakan manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak heran apabila kisruh massa terjadi dimana-mana.

Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh sejumlah petinggi di level pusat maupun daerah, swasta maupun oknum-oknum tak bertanggung jawab berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan program bansos itu sendiri. Respon pemerintah terhadap kasus pelanggaran hukum, melalui KPK misalnya, dapat mencerminkan efektivitas penegakan hukum dan independensi lembaga penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kemunculan kolokasi dan konkordansi dalam LCC Indonesia 2023, representasi bansos dalam wacana keseluruhan dikonstruksi dalam struktur administratif dan distributif. Hal itu disebabkan oleh kemunculan leksikon yang memposisikan tujuan kesejahteraan sebagai suatu persoalan yang berhubungan dengan teknis anggaran dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, melalui pendekatan analisis wacana kritis berbasis korpus, penelitian ini dapat membuktikan bahwa wacana bansos mereproduksi ideologi kesejahteraan dan relasi kekuasaan antar negara dan rakyat, tidak hanya merepresentasikan kebijakan sosial.

Meskipun mencakup data dari tahun 2008 hingga 2022, penelitian ini masih terbatas pada 43 teks dari korpus LCC Indonesia 2023 dengan pengambilan 5 kolokat saja. Keterbatasan ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif menggunakan Korpus Indonesia (KOIN) dan mengekstraksi kolokasi dalam

jumlah yang lebih besar. Langkah tersebut penting dilakukan agar hasil representasi bahasa yang ditemukan dapat menjangkau konteks yang lebih luas dan variatif."

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Al Fajri, M. S. (2017). Hegemonic and minority discourses around immigrants: A corpus-based critical discourse analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 381–390. <https://doi.org/10.17509/ijal.v7i2.8349>
- Alba, A. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial*. Unimal Press.
- Baker, P. (2006). *Using Corpora for Discourse Analysis*. Continuum.
- Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). *Corpus Linguistics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804489>
- Budiawan, R. Y. S., & Mulyani, T. (2022). Analisis Wacana pada Pemberitaan Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 dalam Kompas.Com (Discourse Analysis of The Covid-19 Social Assistance & Corruption News in Kompas.Com). *Jalabahasa*, 18(1), 46–60. <https://doi.org/10.36567/jalabahasa.v18i1.889>
- Bungsu, A. (2019). Citra KPK Pada Kasus Korupsi Menteri Juliari Batubara (Analisis Wacana Kritis Fairclogh). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.48>
- Ciptawaty, U., Ambya, A., Nairobi, N., Suparta, I. W., Djayasinga, M., & Wahyudi, H. (2025). The poverty alleviation program in A Tsunami impacted area: Models PKH and BPNT Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 2184–2198. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5758>
- Hamad, I. (2007). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 325–344. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252>
- Insani, I., & Roselani, N. G. A. (2023). Bundle-move analysis in research article of science and technology: connecting lexical bundles and rhetorical move. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 5(1), 109–130. <https://doi.org/10.15642/suluk.2023.5.1.109-130>
- Isnah, E. S. (2020). Identitas Dalam Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Jurusan Teknik Kelautan 2019 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. *SULUK : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 1(2), 100–104. <https://doi.org/10.15642/suluk.2019.1.2.100-104>
- Lantowa, J., & Idul, R. (2023). Representasi Aksi Sosial dalam Konstruksi Ideologi Media Berita Digital Terkait Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.26499/rnh.v12i1.5269>



- Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- McEnery, T., & Wilson, A. (1996). *Corpus Linguistics (Edinburgh Textbooks in Empirical Linguistics Series)*. Edinburgh University Press.
- Pribadi, R., & Riady, Y. (2022). Cognition-Sociocultural in Tempo Newspaper Article entitled "Evaluasi Pemilu Serentak Mendesak." *LADU: Journal of Languages and Education*, 2(6), 207–217. <https://doi.org/10.56724/ladu.v2i6.141>
- Seretan, V., & Wehrli, E. (2010). Tools for syntactic concordancing. *Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, IMCSIT 2010*, 5, 493–500. <https://doi.org/10.1109/imcsit.2010.5679742>